



2025

RENCANA AKSI KINERJA (RAK)

PENGADILAN MILITER UTAMA

PENGADILAN
MILITER UTAMA



021-29832987



admin@dilmiltama.go.id



JL RAYA PENGGILINGAN, CAKUNG
JAKARTA TIMUR



www.dilmiltama.go.id



**RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN MILITER UTAMA
TAHUN 2025**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Militer Utama dalam rangka mewujudkan visi yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG”

Dengan Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

Tugas Pokok Pengadilan Militer Utama berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

Fungsi Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yaitu fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang menjadi kewenangannya;
2. Fungsi Pembinaan yaitu melakukan pembinaan baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum;
3. Fungsi Pengawasan yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer di seluruh Indonesia;

4. Fungsi Administratif yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer Utama Tahun 2025 sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	36%	36%	36%	36%
		d. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	90%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		1	2	3	4					
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara tingkat banding yang mendekati 3 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara tingkat banding	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Tingkat Banding tepat waktu	Rp. 455.932.000,-
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara tingkat banding yang mendekati 3 bulan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Tingkat Banding tepat waktu	
3.	Melaksanakan persidangan perkara tingkat banding dengan tepat waktu	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan perkara tingkat banding dengan tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Tingkat Banding tepat waktu	

4.	Memutus perkara tingkat banding tidak lebih dari 3 bulan	√	√	√	√	Perkara Tingkat Banding yang diputus tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Tingkat Banding tepat waktu	
5.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perbedaan pendapat yang mendekati 3 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara perbedaan pendapat	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat tepat waktu	Rp. 455.932.000,-
6.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara perbedaan pendapat yang lebih dari 3 bulan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat tepat waktu	
7.	Melaksanakan persidangan perkara perbedaan pendapat dengan tepat waktu	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan perkara perbedaan pendapat dengan tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat tepat waktu	
8.	Memutus perkara perbedaan pendapat tidak lebih dari 3 bulan	√	√	√	√	Perkara perbedaan pendapat yang diputus tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat tepat waktu	
9.	Mendata perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi	√	√	√	√	Terdatanya perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara yang tidak melakukan Upaya Hukum Kasasi	Rp. 455.932.000,-

10.	Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat	√				Terbentuknya Tim Survei Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	Rp. 5.966.692.000,-
11.	Menyusun Job Description Tim Survei Kepuasan Masyarakat	√				Job Description TIM SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	
12.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survei Kepuasan Masyarakat	√				Jadwal dan Perangkat SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	
13.	Melaksanakan SKM	√	√	√	√	Kuisisioner SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	
14.	Mendata dan Merekap Hasil SKM	√	√	√	√	Data Hasil SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan	Survei Kepuasan Masyarakat	

							dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI		
15.	Menyusun Laporan Hasil SKM	√	√	√	√	Laporan SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	
16.	Melakukan Evaluasi Berdasarkan Hasil SKM dan Melakukan Tinjauan Manajemen	√	√	√	√	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SKM	Program Dukungan Manajemen dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Dukungan Manajemen serta Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Survei Kepuasan Masyarakat	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		1	2	3	4					
1.	Menginventarisir salinan putusan yang akan dikirimkan kepada Papera, Orjen TNI / Pengadilan Pengaju	√	√	√	√	Terdatanya salinan putusan yang akan dikirimkan kepada Papera, Orjen TNI / Pengadilan Pengaju	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Pengiriman berkas perkara dan Salinan putusan kepada Papera, Orjen TNI dan Pengadilan Pengaju	Rp. 3.598.000,-
2.	Mengirimkan Salinan putusan kepada Papera, Orjen TNI / Pengadilan Pengaju tepat waktu	√	√	√	√	Salinan putusan perkara diterima oleh Papera, Orjen TNI / Pengadilan Pengaju dengan tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Pengiriman berkas perkara dan Salinan putusan kepada Papera, Orjen TNI dan Pengadilan Pengaju	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%


NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		1	2	3	4					
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang akan diselesaikan di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Terselesaikannya perkara sesuai rencana sidang di luar gedung pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Rp. 55.000.000,-
2.	Melaksanakan persidangan di luar gedung pengadilan sesuai dengan rencana sidang		√	√		Terselesaikannya perkara sesuai rencana sidang di luar gedung pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	
3.	Memutus perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan		√	√		Terselesaikannya perkara sesuai rencana sidang di luar gedung pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	

**JADWAL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER UTAMA**

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL MONEV (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		1	2	3	4			
1.	Monitoring dan Evaluasi penyelesaian perkara pidana militer tingkat banding dengan tepat waktu	√	√	√	√	Proses perkara pidana militer tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara pidana militer yang diselesaikan pada tingkat banding di Pengadilan Militer Utama
2.	Monitoring dan Evaluasi penyelesaian perkara perbedaan pendapat dengan tepat waktu	√	√	√	√	Proses perkara perbedaan pendapat diselesaikan tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan di Pengadilan Militer Utama
3.	Monitoring dan Evaluasi terhadap perkara tingkat banding yang tidak mengajukan upaya hukum	√	√	√	√	Jumlah perkara tingkat banding yang tidak mengajukan upaya hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara banding yang tidak mengajukan upaya hukum
4.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	√	√	√	√	Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Program Dukungan Manajemen	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan
6.	Monitoring dan Evaluasi terhadap persentase salinan putusan yang dikirim ke Papera dan Orjen TNI/ Pengadilan Pengaju dengan tepat waktu	√	√	√	√	Jumlah salinan putusan perkara tingkat banding yang dikirim ke Papera dan Orjen TNI/ Pengadilan Pengaju dengan tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Pengiriman salinan putusan ke Papera dan Orjen TNI/ Pengadilan Pengaju

Jakarta, 3 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer Utama


 Ismu Edy Aryanto
 Laksamana Muda TNI